

**Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI  
Press Conference PCWTO  
5 Desember 2013**

DPR RI bekerjasama dengan Parlemen Eropa dan Inter-Parliamentary Union (IPU) telah menyelenggarakan Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO) pada tanggal 2 dan 5 Desember 2013 di Bali. Perwakilan parlemen dari 39 negara dan perwakilan dari tiga organisasi parlemen internasional turut menghadiri acara tersebut.

Delegasi DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, **Dr. Marzuki Alie**, terdiri dari : **Drs. Priyo Budi Santoso** (Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam), **Dr. Surahman Hidayat, MA** (Ketua BKSAP), **Dr. Muhammad Prakosa** (Wakil Ketua BKSAP), **Andi Anzhar Cakra Wijaya (Wakil Ketua BKSAP)**, **Dr. Nurhayati Ali Assegaf**, **Ir. A. Edwin Kawilarang** dan **Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc.**

PCWTO telah mengadakan empat sesi diskusi yang mencakup berbagai tema. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pertemuan tersebut, antara lain: Ketentuan WTO harus diimplementasikan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. WTO seharusnya dapat dipandang bukan saja sebagai forum antar pemerintah, tetapi lebih melibatkan pihak parlemen. Dalam beberapa kasus, parlemen justru tersingkir dari proses negosiasi. Pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Diperlukan dukungan yang lebih baik dalam hal finansial maupun ketersediaan informasi untuk meningkatkan keterlibatan parlemen dalam proses pengambilan keputusan. Peran parlemen bukan hanya dalam proses democratic accountability, tetapi juga untuk memberikan kontribusi dan solusi. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka demokrasi dalam sistem perdagangan internasional juga harus ditegakkan.

Delegasi DPR RI secara tegas menyampaikan bahwa WTO perlu mempertimbangkan aspek ketahanan pangan dan implikasi perdagangan bebas terhadap para petani tradisional. Secara khusus, DPR RI juga menyampaikan bahwa WTO seharusnya mengeliminasi berbagai kampanye negatif terhadap komoditi minyak sawit dan produk turunannya serta membuka akses pasar bagi produk sawit di negara-negara maju, terutama karena tanaman sawit di Indonesia diproduksi secara tradisional dan menyerap lapangan kerja dalam jumlah besar.

DPR RI juga mendukung tercapainya kesepakatan yang tertuang dalam Bali Package. Walaupun secara realistis memang cukup sulit untuk diwujudkan, namun masih terbuka ruang untuk konsultasi sampai MC9 ditutup besok pada sore hari. PC WTO selesai pada hari ini, tetapi masih terbuka kemungkinan perkembangan lebih lanjut dari Pertemuan Tingkat Menteri WTO, sesuai dengan fleksibilitas yang akan diperlihatkan oleh India dan kelompok Negara maju terkait dengan klausul perdamaian dan dibebaskannya pemberian subsidi pangan oleh India. DPR RI secara aktif juga turut melakukan *lobbying* kepada perwakilan parlemen yang hadir dalam PC WTO sehubungan dengan dukungan terhadap Bali Package.

PCWTO telah menghasilkan **Outcome Document** yang menyepakati beberapa hal, antara lain: 1) Menegaskan komitmen untuk mendukung sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan adil berdasarkan prinsip non-diskriminasi; 2) Bahwa aktifitas perdagangan internasional memiliki peran

penting sebagai salah satu alat untuk mendorong pembangunan; 3) Perlu ada keselarasan antara Preferential Trade Agreements, termasuk diantaranya kerjasama perdagangan plurilateral, regional, dan bilateral, dengan sistem perdagangan multilateral; 4) Mengharapkan adanya perkembangan dalam berbagai bidang, termasuk dalam negosiasi perdagangan untuk produk barang dan jasa lingkungan; 5) Mendukung keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan bebas; dan 6) Menyuarakan agar WTO dapat lebih mengakomodasi keterlibatan parlemen untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perdagangan internasional.

**Indonesia memberikan beberapa masukan amandemen terhadap Outcome Document**, yang diterima oleh Steering Committee PCWTO, yaitu: Menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme perdagangan multilateral dan bahwa hasil kesepakatan Doha Development Agenda harus seimbang dan lebih adil bagi kelompok negara berkembang dan kurang berkembang.

Anggota BKSAP, **Dr. Nurhayati Ali Assegaf**, yang juga menjabat sebagai anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU), turut menghadiri Steering Committee Meeting PC WTO dengan agenda pembahasan Outcome Document. Indonesia akan mengajukan diri untuk menjadi anggota Steering Committee PCWTO pada tahun 2014, bersamaan dengan rotasi anggota Steering Committee.

Dalam pandangan DPR RI, perdagangan internasional dalam kerangka multilateral memang diperlukan, sepanjang komoditas yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan negara yang bersangkutan. Selain kerangka kerjasama multilateral, DPR RI masih memandang perlunya kerjasama bilateral, regional, dan plurilateral untuk terus dikembangkan. Dalam prakteknya, kerjasama perdagangan non-multilateral dapat lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingannya. Selain itu, perdagangan internasional tentu harus dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip *open and fair trade* dan *mutual respect*.

\*\*\*